

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan bagaimana pelaksanaan kebijakan program pelatihan kerja oleh UPTD BLK Kabupaten Agam. Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti, serta pembahasan yang menghubungkan permasalahan dengan teori implementasi George C. Edwards III, dapat dinyatakan bahwa pelaksanaan Program Pelatihan Kerja oleh UPTD BLK Kabupaten Agam telah berjalan secara efisien. Meskipun sejumlah indikator belum berjalan sesuai rencana, masih ada indikator lain yang belum dapat dilaksanakan dengan baik oleh UPTD BLK Kabupaten Agam dalam menjalankan tugas utamanya, yaitu menyelenggarakan program pelatihan kerja, karena masih menghadapi beberapa hambatan.

Berdasarkan hasil temuan penelitian diatas, yang telah dianalisis oleh peneliti dengan menggunakan teori implementasi Edwards III, dapat diambil beberapa kesimpulan. Pertama, dalam hal komunikasi kebijakan, cukup jelas dan telah disampaikan secara luas kepada masyarakat, komunikasi tersebut sudah relatif konsisten. Kedua, dalam hal sumber daya, implementor belum cukup banyak secara kuantitas dan masih perlu penambahan staf jika ingin menambah sub-kejuruan, dan dari segi kualitas masih belum memadai, termasuk fasilitas yang diperlukan untuk pelaksanaan kebijakan ini. Namun, informasi mengenai tata cara pelaksanaan kebijakan dan kewenangan implementor telah terpenuhi.

Ketiga, dalam hal disposisi, pengangkatan birokrat belum berjalan efektif, tetapi insentif telah diberikan kepada implementor sebagai motivasi. Terakhir, dalam hal struktur birokrasi, implementor telah dapat melaksanakan indikator SOP dan mengatasi fragmentasi secara efektif.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari temuan penelitian tentang pelaksanaan Program Pelatihan Kerja oleh UPTD BLK Kabupaten Agam yang telah disampaikan oleh peneliti sebelumnya, berikut ini beberapa rekomendasi yang diharapkan dapat meningkatkan atau memperbaiki pelaksanaan kebijakan ini. Saran-saran tersebut meliputi:

1. Perlu diadakan koordinasi dengan Pemerintah pusat dan daerah Kabupaten Agam untuk membahas secara lebih rinci program pelatihan kerja. Tujuannya adalah agar terjadi peningkatan program pelatihan kerja dan menghindari salah penafsiran yang beragam dan kesalahpahaman antara pihak yang melaksanakan kebijakan dan pihak yang membuat kebijakan.
2. Memaksimalkan upaya untuk menyampaikan Program Pelatihan Kerja kepada masyarakat secara jelas dan rinci. Ini bisa dilakukan melalui berbagai cara seperti kegiatan sosialisasi, pemasangan banner di gedung BLK atau bangunan pemerintah lainnya di Kabupaten Agam, dan memanfaatkan media sosial serta situs web pemerintah.

3. Menyarankan perekrutan staf yang memiliki tingkat pendidikan yang memadai dan memiliki latar belakang pendidikan yang relevan dengan tugas yang akan dijalankan oleh Dinas DPMPTSP-Naker, yang bertanggung jawab atas UPTD BLK Kabupaten Agam. Usulan ini kemudian dapat diajukan kepada sekretariat daerah yang akan melaksanakan rekrutmen terbuka untuk Tenaga Harian Lepas.
4. Sediakan fasilitas yang memadai untuk UPTD BLK Kabupaten Agam, sehingga mereka dapat menjalankan kebijakan program pelatihan kerja secara efektif dan efisien, termasuk dengan meningkatkan sarana dan prasarana yang mendukung berbagai sub-kejuruan dalam program pelatihan.
5. Tetapkan kriteria yang khusus dalam proses perekrutan tenaga kerja untuk memastikan bahwa staf operasional di UPTD BLK Kabupaten Agam memiliki kualifikasi yang baik dan mampu menjalankan tugas mereka secara efektif dalam pelaksanaan program pelatihan kerja.

